



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Oleh;
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

1 Permohonan Elektronik/Electronic Filing

2 Jadwal Sidang

3 Tempat Duduk Sidang

4 Case Retrieval dan Tracking Perkara

5 Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

6 Website MK dan Click MK



PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk memberikan kemudahan bagi Para Pihak Yang Berperkara di MK sebagai perwujudan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / Electronic Filing), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

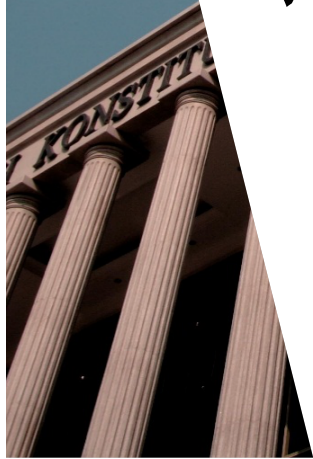


KEMUDAHAN AKSES BERPERKARA DI MK

- ✓ Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email Para Pihak
- ✓ Data Dashboard Perkara PUU
- ✓ Pengajuan Permohonan secara Online
- ✓ Pengajuan Permohonan Offline/Hadir di MK dengan sistem antrian berbasis elektronik
- ✓ Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
- ✓ Live Digitalisasi Online Dokumen Perkara
- ✓ Case Tracking
- ✓ Case Retrieval
- ✓ Click MK
- ✓ Konsultasi dan Tanya Jawab Online
- ✓ Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik sehingga tidak bisa dipalsukan
- ✓ Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang
- ✓ Hubungi MK
- ✓ Persidangan Jarak Jauh
- ✓ Streaming Persidangan MK
- ✓ Pengaduan ke MK

PERSIAPAN SEBUAH PERMOHONAN ONLINE

- ✓ Paket Internet/Hotspot
- ✓ PC/Notebook/Smartphone
- ✓ Mesin Scanner/Camera Photo Smartphone
- ✓ Aplikasi E-Mail di smartphone
- ✓ KTP
- ✓ Alamat Email
- ✓ Nomor HP
- ✓ Daftar Kuasa Hukum jika menggunakan kuasa
- ✓ Digitalisasi Materi Permohonan



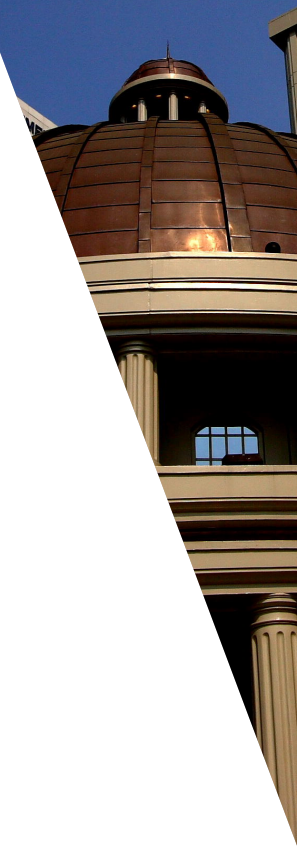
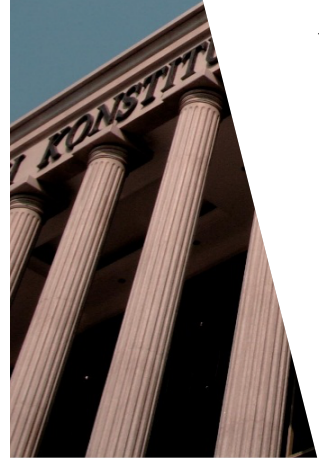
PENTINGNYA E-MAIL DAN NOMOR HP PARA PIHAK

Email Para Pihak akan senantiasa rutin mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan dan Dokumen Hukum Mahkamah Konstitusi:

- ✓ Mendapatkan login untuk mengajukan permohonan online dan mendapatkan Tanda Terima Online
- ✓ Mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan MK: Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, Akta Permohonan Lengkap/Belum Lengkap, Akta Registrasi Perkara, Pemberitahuan Sidang Pertama, Penyampaian Jadwal Sidang, Penyampaian Salinan Permohonan, Penyampaian Jawaban Termohon, Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, Penyampaian Salinan Putusan
- ✓ Seluruh dokumen produk MK telah menggunakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik
- ✓ Sebagai media komunikasi yang handal antara Juru Panggil MK dengan Para Pihak

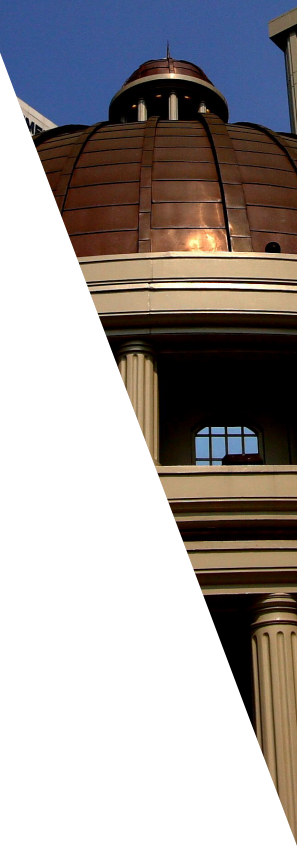
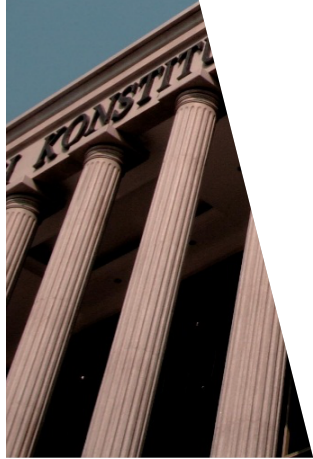
PENTINGNYA SIMPEL

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Simpel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.



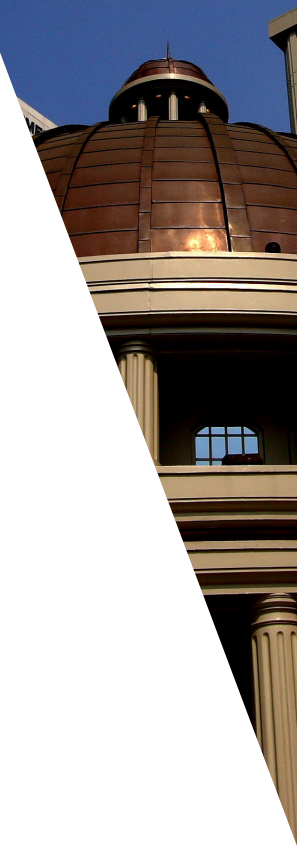
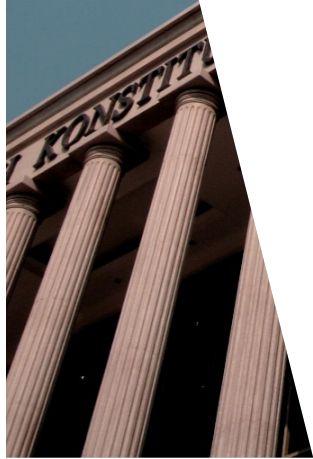
PENTINGNYA SIMPEL

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Simpel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.



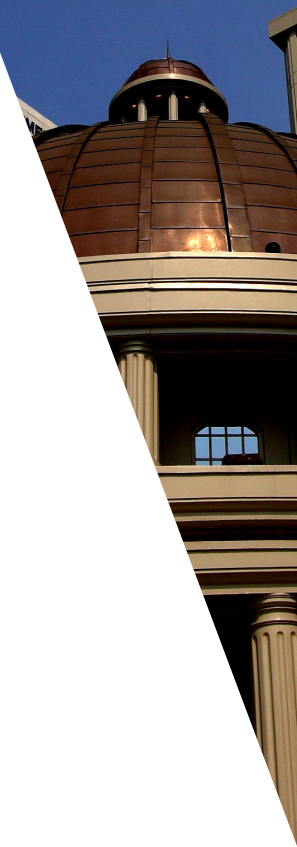
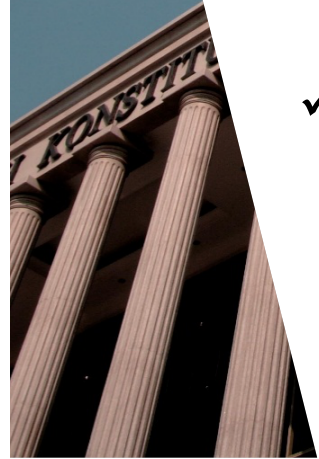
PENGAJUAN PERMOHONAN HADIR DI MK

- ✓ Menyiapkan Dokumen Permohonan
- ✓ Mengisi dan mendapatkan NUPP
- ✓ Mendapatkan Waktu Permohonan
- ✓ Menunggu Panggilan Antrian untuk dilayani



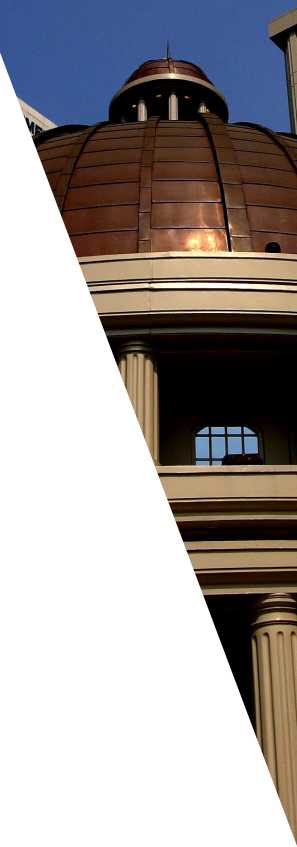
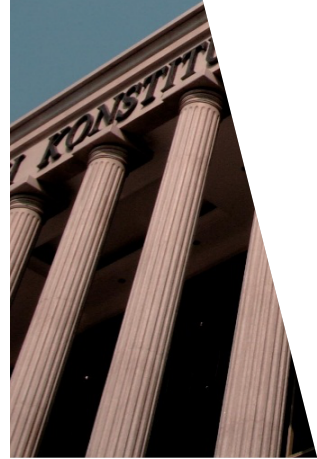
SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- ✓ Pengganti tanda tangan basah yang valid dan sama nilainya dengan tanda tangan basah
- ✓ Tanda Tangan elektronik MK tersertifikasi langsung dengan BSSN (Badan Syber Sandi Negara)
- ✓ Dokumen Elektronik MK Otentik dan dapat diuji dengan smartphone dimanapun berada
- ✓ Tidak dapat dipalsukan walaupun penambahan ataupun pengurangan sebuah titik (.), koma (,) maupun spasi ()
- ✓ Pemberlakuan UU ITE Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



INFORMASI DAN LAYANAN ONLINE MK LAINNYA

- ✓ Case Retrieval
- ✓ Case Tracking
- ✓ Hubungi MK
- ✓ Dewan Etik
- ✓ Email MK
- ✓ Telpon MK
- ✓ Konsultasi MK
- ✓ Jadwal Sidang MK
- ✓ Putusan MK
- ✓ Risalah MK
- ✓ Streaming dan Persidangan Jarak Jauh MK



SIMPEL (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)

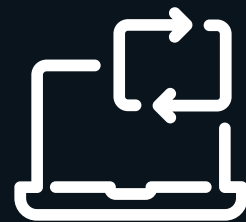


SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”



1. Pendaftaran User Baru dan Login;

Pengajuan Permohonan Online

Mahkamah Konstitusi RI [Tentang Simpel](#) [Panduan Aplikasi](#) [Kontak](#) [FAQ](#) [Sign Up](#) [Login](#)

simpel.mkri.id
Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Nama Lengkap

Nomor Telepon / Handphone

Alamat Email

Password Minimal 8 Character



Regenerate

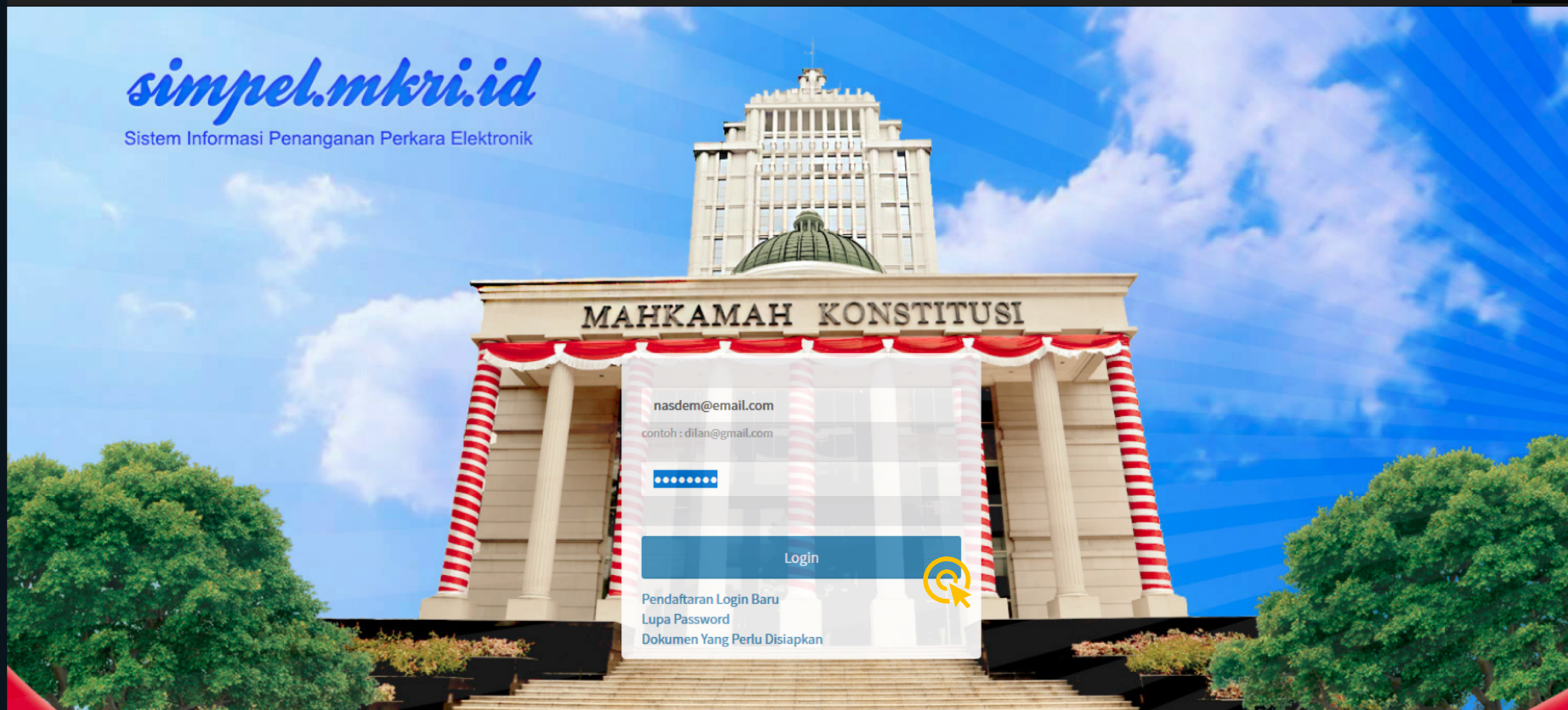
*) Tuliskan kembali huruf atau angka yang sesuai pada gambar.

Register

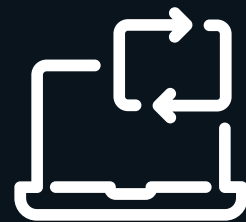
[Saya sudah punya akun](#)

Pendaftaran Akun Baru

Pengajuan Permohonan Online



Login setelah daftar akun



2. Pengajuan Permohonan Online Perkara Pengujian Undang-Undang

Pengajuan Permohonan Online Perkara Pengujian Undang-Undang

SIMPEL

ishak@mkri.id
Online

- Dashboard
- DPD
- Pilkada
- PUU
 - Permohonan PUU
- Informasi Perkara
- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Pemilihan Presiden

Kamis, 22
Agustus 2019
11:11:38

ishak@mkri.id

Permohonan Online Perkara Pengujian Undang-Undang

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

Permohonan Online

1. Identitas Pemohon

Nomor KTP

Upload KTP No file chosen
*) Ukuran file maksimal : 1 MB

Nama

Alamat

Email

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

Nomor Handphone

2. Identitas Kuasa Pemohon

Nomor KTP

Upload KTP No file chosen
*) Ukuran file maksimal : 1 MB

Upload Surat Kuasa No file chosen
*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 3 MB

Nama

Uraian Permohonan

Upload Permohonan No file chosen
*) File harus dengan ekstensi (.pdf) file maksimal : 3 MB

Pengajuan Permohonan Online Perkara Pengujian Undang-Undang

SIMPEL nasdem@email.com -

nasdem@email.com
Online

Dashboard

Pileg 2019

- Pengajuan Permohonan
- Pengajuan Perorangan
- Informasi Permohonan
- Keterangan Pihak Terkait

Kunjungan Sidang

Informasi Perkara

Kuasa Hukum

Bantuan

Selasa, 16 Oktober 2018
13:43:03

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 3/PAN.ONLINE/DPR-DPRD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Jawa Tengah Jateng Tahun 2019

Pemohon : Partai Nasional Demokrat Nasdem

Kuasa Pemohon :

Tanggal : 15 Oktober 2018 Pukul : 22:54 WIB

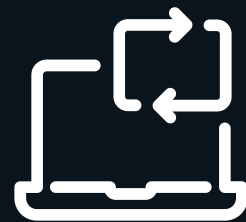
NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	KTP Pemohon	ADA
3	Keputusan Termohon	ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	ADA
5	Alat/Dokumen Bukti	ADA
6	Surat Referensi Partai	ADA
7	Surat Kuasa	TIDAK ADA
8	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera
TTD
Kasianur Sidauruk

Pemohon
Partai Nasional Demokrat Nasdem

Catatan :
1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila yang menyerahkan bukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

Pemohon mendapatkan tanda terima online permohonan



3. Tracking Perkara;

Tracking Perkara

The screenshot shows the search interface of the Mahkamah Konstitusi website. The browser address bar displays 'https://search.mkri.id'. The website header includes the logo and name of the Mahkamah Konstitusi, a search bar with the text 'Cari', and navigation tabs for 'PUU', 'SKLN', 'PHPU', and 'PHPKADA'. Below the header, there are three main sections: 'Jenis dokumen', 'Jenis perkara', and 'Amar putusan'. Each section contains a list of categories with corresponding counts. The 'Jenis dokumen' section includes 'Putusan' (2,937), 'Ikhtisar Putusan' (245), 'Risalah Persidangan' (9,283), and 'Anotasi' (58). The 'Jenis perkara' section includes 'Semua jenis perkara' (6,474), 'PUU' (124), 'SKLN' (622), 'PHPU.A' (66), 'PHPU.C' (75), 'PHPU.C1' (23), and 'PHPU.D' (4,046). The 'Amar putusan' section includes 'Semua amar putusan' (1,275), 'Ditolak' (149), and 'Dikabulkan sebagian' (278). On the right side, there are two case cards. The first card is for case 82/PUU-XVI/2018, titled 'Penguujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', with a decision date of 26 November 2018. The second card is for case 79/PUU-XVI/2018, titled 'Penguujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', with a decision date of 26 November 2018. Both cards include a 'Case tracking' button.

Jenis dokumen

<input type="radio"/> Putusan	2.937
<input type="radio"/> Ikhtisar Putusan	245
<input type="radio"/> Risalah Persidangan	9.283
<input type="radio"/> Anotasi	58

Jenis perkara

<input type="checkbox"/> Semua jenis perkara	6.474
<input type="checkbox"/> PUU	124
<input type="checkbox"/> SKLN	622
<input type="checkbox"/> PHPU	66
<input type="checkbox"/> PHPU.A	75
<input type="checkbox"/> PHPU.C	23
<input type="checkbox"/> PHPU.C1	4.046
<input type="checkbox"/> PHPU.D	

Amar putusan

<input type="checkbox"/> Semua amar putusan	1.275
<input type="checkbox"/> Ditolak	149
<input type="checkbox"/> Dikabulkan sebagian	278

82/PUU-XVI/2018 Putusan

Penguujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
Tanggal diucapkan: 26 November 2018

Case tracking

79/PUU-XVI/2018 Putusan

Penguujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar putusan: 1.MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON SEPANJANG BERKENAAN DENGAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TIDAK DAPAT DITERIMA; 2.MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA
Tanggal diucapkan: 26 November 2018

Case tracking

78/PUU-XVI/2018 Putusan

Monitoring status perkara

Tracking Perkara

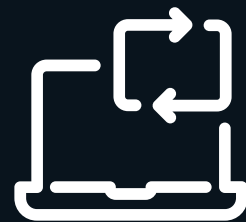
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Paniai Tahun 2018



PROSES

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	01-08-2018	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 72/1/PAN.MK/2018	Permohonan Permohonan AP3 dan DKPP
2	02-08-2018	Penerbitan APL dan DPKP2 dengan Nomor 71/2/PAN.MK/2018	APL dan DPKP2
3	06-08-2018	Penyerahan Perbaikan Permohonan	
4	06-08-2018	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 71/PHP.BUP-XVII/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 71/3/PAN.MK/2018	ARPK
5	06-08-2018	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 283/PAN.MK/8/2018 dan Ketetapan Sidang Pertama dengan nomor 71/TAP.MK/2018	Ketetapan Sidang Pertama

Monitoring status perkara



4. Tempat Duduk Sidang;

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

Jadwal Sidang Pemohon

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

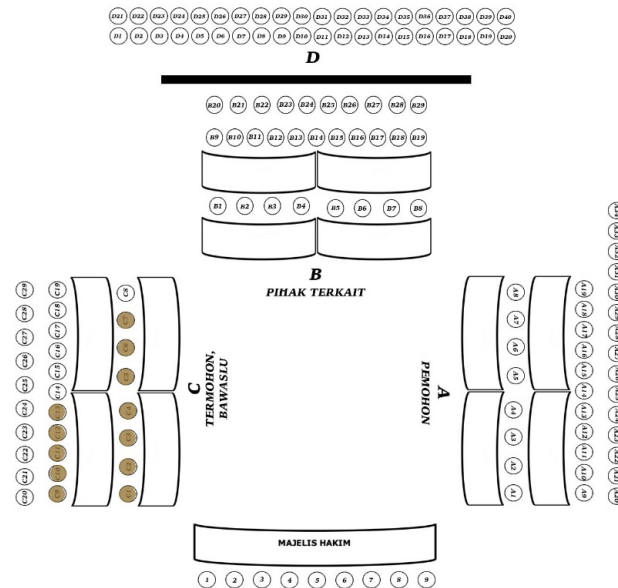
Kamis, 4 Oktober 2018
14:06:58

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

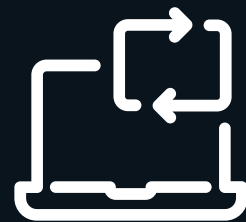
Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVII/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



5. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

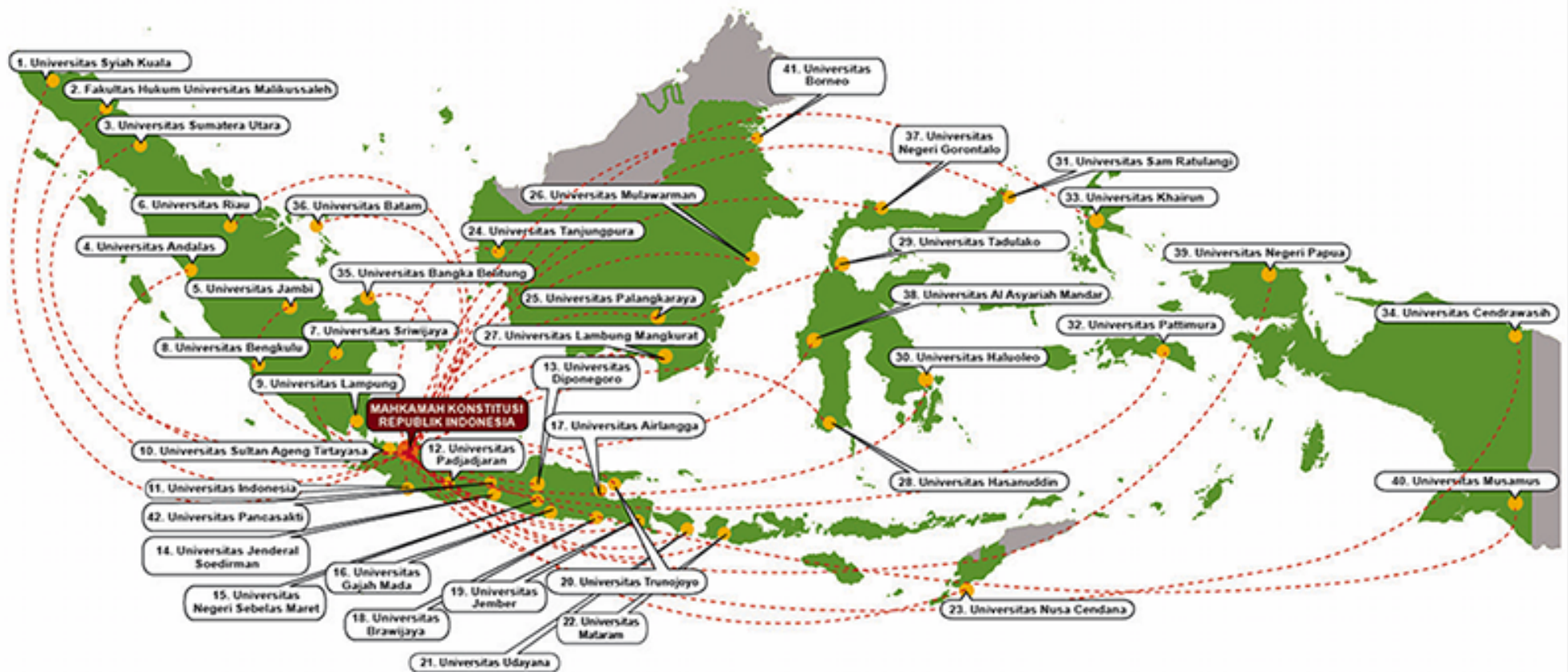
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



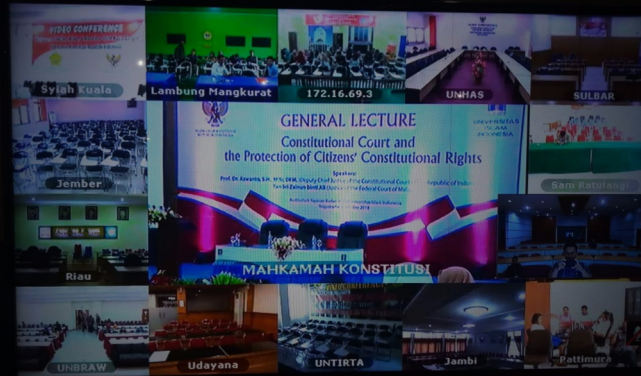
Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



**TERIMA
KASIH**